

Salah Input Data di Sirekap KPU Pelanggaran Tertinggi di Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU menjadi sorotan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya, banyak ditemukan perbedaan data antara hasil perhitungan manual di tempat pemungutan suara (TPS) dengan yang diunggah di Sirekap.

Hal itu pun menjadikan input dalam Sirekap menjadi pelanggaran tertinggi, 25 persen yang diperoleh sejak H-1 hingga H+3 sejak hari Pemilihan Umum 14 Februari 2024 lalu.

Pelanggaran tertinggi berikutnya adalah kesalahan administrasi tata cara pelayanan pelaksanaan pemungutan suara (22%), yang dilakukan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan.

Sekretaris Perkumpulan Jaga Pemilu, Luky Djani dalam konferensi pers bersama para lembaga-lembaga masyarakat sipil memantau Pemilu 2024 di Jakarta, Sabtu (17/2), menyebutkan kedua pelanggaran itu diperoleh dari

pantauan yang Jaga Pemilu lakukan di hampir 7000 TPS, baik oleh Penjaga Pemilu yang registrasi, maupun dari masyarakat.

Keduanya berbeda dari isu pelanggaran tertinggi sebelum hari H yang didominasi oleh ketidaknetralan aparat.

"Selain salah input Sirekap dan kesalahan administrasi tata cara pemilu, juga ada persoalan netralitas penyelenggara, politik uang di H-1 sampai menjelang pencoblosan atau yang dikenal sebagai serangan fajar, juga ada pelanggaran terkait dengan Daftar Pemilih Tetap. Misalnya, ada nama di daftar tapi tidak menerima surat panggilan. Atau sebaliknya, ada anggota keluarga yang sudah wafat tapi menerima surat panggilan," ujarnya.

Luky melanjutkan, apa yang terjadi di Pemilu 2024 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 1992 ketika Orde Baru masih berkuasa. ● mar

Anak SYL Diduga Kuat Terlibat Jual Beli Jabatan di Kementan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anak Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo, ikut campur tangan terkait dugaan jual beli jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan).

SYL adalah mantan Menteri Pertanian yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (IPPU).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, SYL diduga mendapatkan uang dari pejabat yang jabatannya dirotasi.

"Kemudian ada campur tangan pihak lain di antaranya adalah saksi (Kemal)," kata Ali kepada wartawan, Minggu (18/2).

Ali menyebut, ketika mendalami dugaan pemerasan dalam jabatan oleh SYL secara umum, KPK berpegang pada asas fiksi hukum. Asas ini menilai seseorang, dalam hal ini SYL, mengetahui semua aturan yang telah

diundangkan menyangkut rotasi dan mutasi jabatan.

Sementara itu, tidak mungkin rotasi dan mutasi jabatan atau pegawai di lingkungan Kementan melibatkan pihak di luar kementerian yang tidak memiliki wewenang dan kompetensi.

Adapun Kemal memang tidak menjabat di Kementan, melainkan dinas provinsi Sulawesi Selatan.

"Makanya kemudian kami perlu konfirmasi kepada saksi tersebut karena pasti anda juga tahu yang bersangkutan bukan pegawai di Kementan ataupun pejabat di Kementan. Kan poinnya di sana," tutur Ali.

Sebelumnya, penyidik KPK mencecar Kemal terkait dugaan aliran dana yang diterima ayahnya dan praktek jual beli jabatan di lingkungan Kementan pada 5 Februari lalu.

"Termasuk pengetahuan mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan saat itu," tutur Ali, Selasa (6/2). ● mei

2 | Polhukum

FOTO: ANTARA



SEMILAR HARI PERS NASIONAL 2024

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional TPB/SDGs Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho menyampaikan materi dalam Seminar Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Minggu (18/2). Seminar tersebut bertemakan Selamatkan Planet Bumi Melalui Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance).

Jokowi Bisa Dimakzulkan Jika Terbukti Ada Kecurangan pada Pemilu 2024

Segala bentuk indikasi kecurangan Pemilu 2024 harus diusut tuntas. Sebab hal itu dapat mempengaruhi integritas dan legitimasi calon terpilih.

JAKARTA (IM) - Ahli Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH Unbraw), Dhia Al Uyun, menyuarakan Pemilu 2024, mulai dari proses, pemungutan hingga penghitungan suara.

Menurutnya, fenomena dugaan kecurangan ini telah diramalkan oleh film Dirty Vote, terkhusus adanya peran

birokrasi yang mempengaruhi suara hingga politisasi bantuan sosial (bansos).

"Di sisi lain terdapat surat suara tercabol di luar negeri, situasi di Sampang, beberapa KPPS yang meninggal dunia, hingga kemarin terdapat rilis dari Ciberity Foundation, tentang kerawanan Sirekap yang memungkinkan adanya perubahan hasil perhitungan suara," ujar Dhia saat dihu-

bung, Minggu (18/2).

"Iya (pemilu berpeluang diulang), namun harus memperhatikan wilayah mana yg bermasalah," tutur Dhia.

Bahkan menurut Dhia, pemilu tak hanya bisa diulang, melainkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dimakzulkan bila ada bukti kuat yang menggambarkan kecurangan tersistematis. Pasalnya, ia merasa, celah kecurangan itu terjadi akibat ada masalah pada sistem.

"Perlu digarisbawahi yang bermasalah ini sistemnya, manakala bisa dibuktikan kesalahan ini tersistematis maka bukan saja pemilu diulang,

melainkan pemakzulan presiden tidak bisa dihindarkan," terang Dhia.

Harus Diusut

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona, meminta segala bentuk indikasi kecurangan Pemilu 2024 harus diusut tuntas. Menurutnya itu dapat mempengaruhi integritas dan legitimasi calon terpilih.

"Segala kecurangan harus diusut karena akan berpengaruh terhadap integritas pemilu dan legitimasi terhadap calon yang terpilih," kata Yance kepada wartawan, Minggu (18/2).

Ia meminta seluruh elemen masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan agar melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia menyarankan agar tim hukum Paslon 01 dan 03 menghimpun bukti untuk dibawa ke sengketa di Mahka-

mah Konstitusi (MK).

"Masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan sebaiknya segera melaporkan kepada Bawaslu, atau mengungkapkannya dalam portal yang dibuat oleh NGO seperti www.kecuranganpemilu.com. Selain itu, tim hukum dari paslon yg dirugikan, terutama 01 dan 03 perlu menghimpun bukti-bukti tersebut untuk sengketa di MK," ungkapnya.

Sebagai informasi, paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD versi *quick count* atau hitung cepat Pemilu 2024.

Namun, indikasi kecurangan mencuat ke publik usai beredar sejumlah laporan dari berbagai daerah mulai dari tidak sinkronnya input data dari C1 TPS ke sistem Sirekap milik KPU dan lainnya. ● han

Mahfud MD Bantah Beda dengan Ganjar Soal Pernyataannya "Pemilu Sudah Selesai"

JAKARTA (IM) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD membantah dirinya berbeda dengan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ia menjelaskan mengenai pernyataannya yang menyebut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah selesai dan tinggal menunggu hasil akhir.

Mahfud menjelaskan, pernyataan itu artinya pemungutan suara telah berakhir pada 14 Februari 2024. Namun, tahapan pemilu sebagai mekanisme hukum tata negara masih jauh dari selesai dan akan ada langkah hukum maupun politik yang dipersiapkan.

"Jadi, pemilu (sebagai pemungutan suara atau coblosan) sudah selesai pada tanggal 14/2/2024. Tetapi 'tahapan' pemilu sebagai mekanisme hukum tata negara dalam pelaksanaan demokrasi masih jauh dari selesai," kata Mahfud lewat akun X-nya, @mohmahfudmd, Minggu (18/2).

Mahfud pun menegaskan saat ini pihaknya tengah menyiapkan langkah dalam merespons hasil pemilu, yang berdasarkan hasil hitung cepat menunjukkan keunggulan bagi pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Langkah hukum tetap disiapkan, langkah politik juga direncanakan," kata Mahfud.

Ia pun membantah apabila pernyataannya soal 'pemilu sudah selesai' dianggap bertentangan dengan Ganjar Pranowo yang menyebut ada anomali dalam hasil Pemilu 2024.

"Saya bilang juga akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan, implisit, melakukan langkah politik langkah hukum. Jadi tak ada perbedaan substansi antara *statement* saya dan Mas Ganjar," ujar Mahfud.

Pada Jumat (16/2) lalu, Mahfud melalui akun X-nya menyampaikan bahwa pemilihan umum (pemilu)

sudah usai dan kini semua pihak tinggal menunggu hasil akhir yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kawan, pemilu telah selesai, tinggal menunggu hasil akhirnya," tulis Mahfud, Jumat (16/2) siang.

Dalam unggahan itu, Mahfud juga menyerukan agar semua pihak tidak boleh lelah untuk mencintai Indonesia.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan, perjuangan membangun demokrasi dan keadilan juga harus dilanjutkan karena itu tidak terikat pada masa pemilu saja.

"Kita tak boleh lelah mencintai Indonesia. Perjuangan membangun demokrasi dan keadilan harus kita lanjutkan," kata Mahfud.

"Memperjuangkan demokrasi dan keadilan tanpa kenal lelah adalah *beyond election* yang tak dibatasi oleh pemilu yang periodik," ujarnya. ● mei



PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 32 SUKOHARJO

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di TPS 32 Makmahaji, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (18/2). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo merekomendasikan TPS tersebut untuk pemungutan suara ulang calon presiden-calon wakil presiden dan DPD RI dikarenakan terdapat dua orang yang tidak memiliki hak suara mencoblos di TPS tersebut.

GMNI Berharap Semua Pihak Bisa Menerima Hasil Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP-GMNI) berharap semua pihak menerima hasil Pemilu 2024. Mulai dari pemilihan presiden (pilpres) hingga pemilihan legislatif (pileg).

"Semua pihak harus menerima hasil Pemilu 2024, sebagai representasi suara rakyat, terutama setelah KPU mengumumkan rekapitulasi hasil Pilpres dan Pileg paling lambat 20 Maret. Meskipun sebenarnya, lembaga-lembaga kredibel sudah mengumumkan hasil hitung cepat atau *quick count* mereka, yang biasanya memiliki akurasi mendekati hasil resmi KPU," ujar Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi dalam keterangannya, Minggu (18/2).

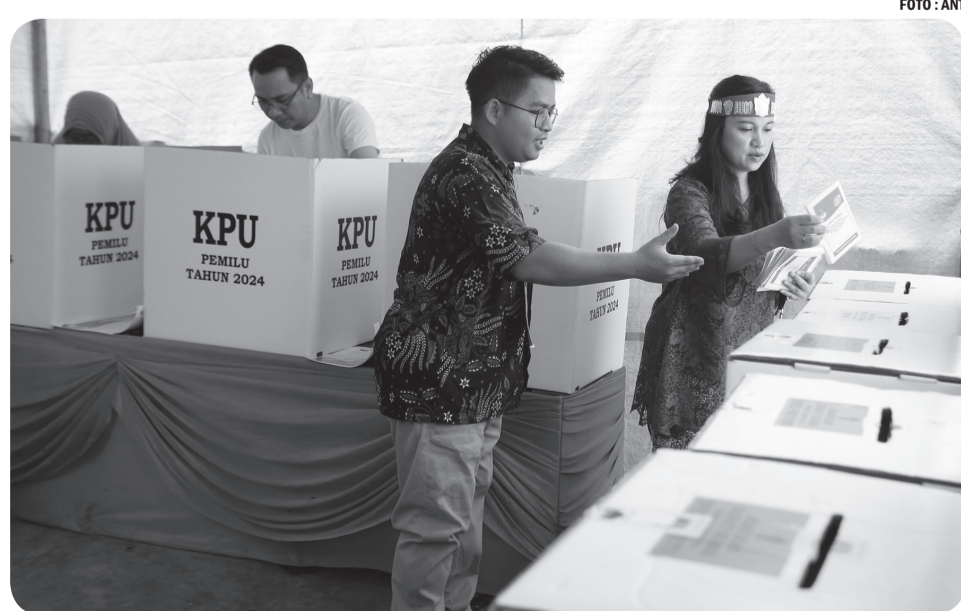
Immanuel menyebut Presiden pertama RI, Soekarno pernah menegaskan pemilu janggan menjadi tempat per-

tempuran perjuangan kepartaian. Apalagi sampai memecah belah persatuan bangsa.

Soekarno, sambung Imanuel, adalah pemimpin yang senantiasa mendorong persatuan nasional. Imanuel menjelaskan Soekarno tidak ingin pemilu menjadi wahana yang memecah-belah bangsa.

"Kita meyakini, suara rakyat adalah 'suara Tuhan', dan suara rakyat itu termanifestasi dalam Pemilu. Maka seharusnya semua pihak tidak mempropagandakan isu-isu yang memecah-belah bangsa pasca pemilu, mari percayakan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu pada lembaga yang berwenang," ujar Imanuel.

"Siapa pun yang terpilih dalam pemilu, kita sebagai bangsa harus tetap bersatu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana dicita-citakan Bung Karno dan para Founding Fathers," pungkasnya. ● mei



PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN PEMILU 2024 DI TANGERANG

Warga bersiap memasukan surat suara ke dalam kotak suara usai menggunakan hak pilihnya di TPS 74 Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (18/2). Sebanyak 14 TPS di Tangerang Selatan melakukan pemungutan suara susulan Pemilu 2024 karena terdampak banjir pada Rabu (14/2).

FOTO: ANT